

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia, Ir. Joko Widodo, infrastruktur menjadi fokus utama. Fakta ini sangat jelas terlihat dari alokasi APBN 2015. Pada APBN 2015, anggaran infrastruktur meningkat drastis menjadi Rp 290,3 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp 84 triliun dibandingkan APBN 2014, yang merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (Kompas.com, 22 Maret 2016). Jika program Joko Widodo hingga 2019 sukses, maka Indonesia akan memiliki 2,650 Km jalan baru, 3,258 Km jalur kereta di Jawa – Sumatera – Sulawesi, 15 bandara baru, 60 lokasi pelabuhan penyeberangan, serta 24 pelabuhan baru (Detik.com, 19 November 2014). Dalam waktu singkat, infrastruktur menjadi pembahasan yang menarik bagi investor asing, kontraktor lokal, asuransi, bahkan politisi.

Tidak hanya di Indonesia, infrastruktur sudah lama menjadi topik bahasan menarik oleh setiap negara. ASCE di New York (2015), telah mengeluarkan beberapa laporan situasi terkait mengenai keadaan infrastruktur negaranya. ASCE memberikan manfaat terhadap suatu negara dalam mengembangkan infrastruktur dengan pakar-pakar yang dimiliki untuk setiap bidang konsentrasi mampu memberikan penilaian dan anggaran yang dibutuhkan dalam pengembangan infrastruktur negaranya. Laporan infrastruktur ini telah banyak membantu pemimpin politik dalam mengambil kebijakan dalam perbaikan dan pengadaan

infrastruktur di negaranya. Hal ini karena dipandang bahwa infrastuktur mendukung perekonomian suatu negara.

Hasil laporan ASCE mengenai penilaian infrastruktur, yaitu *Fragile Foundation: Report Card for New York's Infrastructure* (2015). Laporan infrastruktur ini menjabarkan secara keseluruhan mengenai situasi yang berkaitan dengan infrastruktur yang ada di New York. Dengan dibuatnya *Report Card* ini, pemerintah New York dapat mengetahui kondisi infrastuktur dan solusi untuk memperbaikinya guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Terdapat sembilan infrastruktur yang menjadi evaluasi dengan memuat tingkatan penilaian berdasarkan kinerja dan kapasitas infrastruktur yang ada. Pada tahun 2015, rata-rata nilai infrastruktur masih pada tingkatan C-, yang menunjukkan pencapaian berada pada tingkatan cukup. Hal ini berdasarkan delapan kriteria penting seperti kapasitas, kondisi, pendanaan, kebutuhan masa depan, operasi dan pemeliharaan, keselamatan umum, ketahanan dan inovasi yang masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga para anggota komisi mengusulkan investasi fiskal yang dapat menunjang biaya operasi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Sejak dikeluarkannya laporan infrastruktur pada tahun 2015 ada beberapa infrastruktur yang menjadi perhatian pimpinan pemerintah dikarenakan nilainya yang dibawah batas kecukupan. Struktur pembuangan air limbah menjadi salah satu infrastruktur yang mendapat nilai paling rendah diantara sembilan infrastruktur lainnya. Fasilitas yang dimiliki berjumlah 610 yang terdiri dari pengolahan air limbah kecil dan besar. Namun, infrastruktur yang mengalami

penuaan menjadi masalah penting bagi negara. Peralatan pengolahan air limbah pabrik tua berumur rata-rata lebih dari tigapuluh tahun lebih dan bekerja di luar masa manfaatnya. Untuk memperbaiki, mengganti, dan memperbarui infrastruktur air limbah New York akan menelan biaya miliaran dollar. Selain itu masih banyak infrastruktur penunjang lainnya yang memerlukan perbaikan, penggantian, dan perbaruan yang akan membutuhkan dana trilliunan dollar. Penilaian kelayakan infrastruktur merupakan satu program ASCE untuk memberi data dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di negaranya.

Infrastruktur memiliki posisi yang amat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah. Kegiatan penduduk dapat ditampung dalam ruang ruang sarana sosial dan ekonomi, tetapi tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh pelayanan infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh, kegiatan perekonomian penduduk suatu wilayah mungkin dapat ditampung pada ruang-ruang 2 yang berupa sarana perekonomian, seperti kawasan perdagangan, jasa, dan industri yang dimiliki oleh wilayah tersebut, tetapi tanpa dukungan penyediaan jaringan infrastruktur yang baik, sebagai contoh seperti jaringan jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, dan sanitasi, kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal. Kegiatan perekonomian suatu wilayah yang didukung oleh pelayanan infrastruktur yang baik, dapat mendorong peningkatan intensitas dan kualitas kegiatan tersebut, yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan penduduknya (Button, 2002 dalam Hadi Wahyono,2006).

Sebagaimana diungkapkan di atas, Presiden Joko Widodo sedang giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut Catanesey, Anthony J., dan Jamse C.S(1979:120) dalam bukunya Perencanaan Kota, bahwa keberadaan infrastruktur ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonominya. Namun sejauh ini tidak disadari oleh masyarakat. Terlihat banyak infrastruktur dan sarana lingkungan yang dibangun oleh pemerintah kurang mendapat perhatian dari masyarakat dalam hal pemeliharannya.

Sebagai provinsi yang berkembang dan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia, penilaian infrastruktur yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sangatlah penting. Dengan infrastruktur yang masih terbatas jangkauan pelayanannya, laporan ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam memantau sejauh mana kemampuan dan potensi infrastrukturnya dalam menghadapi perkembangan provinsi dan daerahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mengetahui kelayakan infrastruktur di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna mendukung aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

1.3 Tujuan

1. Melihat sejauh mana kelayakan infrastruktur di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut penilaian yang diberikan para insinyur teknik sipil dengan standar kriteria penilaian ASCE.
2. Membandingkan hasil penilaian infrastruktur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan hasil dari penilaian infrastruktur New York.

1.4 Ruang Lingkup

Infrastruktur yang akan dimasukkan dalam laporan ini meliputi: pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal, stasiun, jembatan dan jalan (nasional, provinsi dan kabupaten), ruang terbuka hijau, konektivitas, air minum, telekomunikasi, dan listrik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai sarana evaluasi terhadap pengambilan kebijakan dalam perbaikan dan pengadaan infrastruktur di daerahnyaanya
2. Sebagai tolok ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun APBD.